

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia ketenagakerjaan di Indonesia selalu mengikuti perubahan perkembangan zaman, dari sudut sosial, ekonomi dan juga jumlah penduduknya. Ketika jumlah orang yang siap bekerja bertambah tetapi kesempatan kerja tidak bertambah sebanding. Sehingga pengangguran menjadi masalah yang terus memerlukan perhatian serius dalam tanggung jawab Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun Daerah. Masalah pengangguran ini sangat berpengaruh pada kehidupan individual seseorang, masyarakat dan keseluruhan. Ketersediaan lapangan kerja dapat membantu kesetaraan dan meningkatkan ekonomi dan sosial¹.

Pada Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara bertujuan untuk “Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Hal ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah berkewajiban menjamin kesejahteraan rakyat, termasuk penyediaan pekerjaan yang layak. Ketentuan tersebut diperjelas dalam pasal 27 ayat (2) “ Tiap-tiap warga Negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan “. ² Prinsip ini sejalan dengan sila ke-5 Pancasila tentang Keadilan Sosial. Jika dalam kenyataannya angka pengangguran masih tinggi maka dapat dianggap sebagai indikasi Negara ini gagal dalam memenuhi hak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 12

¹ Suharnik. *Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran*. Surabaya: UWKS Press, 2023, h. 3

² Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).

ayat (2) disebutkan bahwa urusan ketenagakerjaan termasuk dalam urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah.³ Hal ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan terkait ketenagakerjaan untuk penanggulangan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi karakter kebijakan disetiap tingkatan memiliki perbedaan. Pada pembagian urusan ditingkat Kota / Kabupaten lebih mengutamakan kebijakan yang bersifat Mikro dan langsung melibatkan masyarakat, misalnya Pelatihan Kopetensi melalui Balai Latihan Kerja, pengembangan UMKM, dan pemberdayaan tenaga kerja mandiri.⁴

Ditegaskan Melalui Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1),⁵ bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memiliki kewajiban mengurus bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah, dengan fungsi meliputi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan program, evaluasi serta pelaporan, hingga pengelolaan administrasi, sehingga memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah kota dalam menangani masalah ketenagakerjaan.

Table 1.1 Matriks Pembagian Urusan Bidang Tenaga Kerja Daerah Kabupaten/ Kota

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang “ Pemerintahan Daerah “, Pasal 12 ayat (2)

⁴ Rini Astuti, “ Implementasi Kebijakan Pengangguran di Tingkat Daerah “, Jurnal Administrasi Publik, Vol.8 No.2, 2021, h. 115

⁵ Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 65 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bengkulu Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1),

No	Sub. Urusan	Daerah Kota / Kabupaten
1	2	3
1	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Pelaksanaan pelatihan tenaga berdasarkan unit kompetensi b. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja Swasta. c. Perizinan dan pendaftaran Lembaga pelatihan kerja. d. Konsultasi produktivitas pada Perusahaan kecil. e. Pengukuran Produktivitas tingkat Daerah.
2	Penempatan Tenaga Kerja	a. Menyelenggarakan pelayanan antar kerja di tingkat kabupaten/kota. b. Menerbitkan izin bagi Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS). c. Mengelola informasi pasar kerja di tingkat lokal. d. Melaksanakan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) pada masa pra dan purna penempatan. e. Menerbitkan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dengan lokasi kerja di kabupaten/kota.
3	Hubungan Industrial	a. Mengesahkan peraturan perusahaan dan mendaftarkan perjanjian kerja bersama pada perusahaan yang beroperasi hanya di satu daerah kabupaten/kota. b. Melaksanakan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, termasuk mogok kerja dan penutupan perusahaan di wilayah kabupaten/kota. ⁶

Pengangguran salah satu permasalahan umum yang dihadapi dalam proses pembangunan daerah, termasuk di wilayah Kota Bengkulu. Kota ini memiliki jumlah penduduk

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota.

usia produktif yang relatif tinggi dibanding Provinsi Bengkulu, sehingga menciptakan tekanan tersendiri terhadap ketersediaan lapangan kerja.⁷ Sebagai bentuk tanggung jawabnya, Pemerintah Kota Bengkulu telah menginisiasi berbagai strategi dan kebijakan, seperti pelaksanaan program pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK) serta penguatan kemitraan dengan sekolah menengah kejuruan melalui program Bursa Kerja Khusus (BKK). Program-program tersebut mampu memberikan kontribusi positif dalam penurunan angka pengangguran terbuka. Pada 2023 jumlah penduduk Kota Bengkulu tercatat 391.120 jiwa dan meningkat menjadi 397.321 jiwa pada pertengahan 2024, dengan perkiraan mencapai sekitar 403.728 jiwa pada 2025. Tingkat pengangguran terbuka masih berada di kisaran 5,04% pada tahun 2023, kemudian turun menjadi 3,48% pada 2024. Sementara angka kemiskinan pada akhir 2024 tercatat 13,76% atau sekitar 52.960 jiwa. Kemudian pada tahun 2025 jumlah partisipasi angkatan kerja di Bengkulu sebesar 71,50% serta tingkat pengangguran terbuka sebesar 3,24%.⁸ Angka tersebut menunjukkan kebijakan ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu sudah cukup efektif, meskipun masih ada tantangan dalam menciptakan lapangan kerja.

Dalam Konteks Islam, *Siyasah tanfidziyah* merupakan bagian yang membahas mengenai pelaksanaan peraturan dan kebijakan Negara untuk ketertiban dan kepentingan bersama. Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan

⁷ Aryati, Sunaryanto, "Analisis Pengangguran Terdidik di Provinsi Bengkulu". . *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan JEPP*, Vol.5,No.04, 2015. h.70

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses dari: <https://www.bps.go.id/>.

kebijakan publik yang diberikan agar bermanfaat bagi masyarakatnya⁹.

Kota Bengkulu merupakan salah satu Daerah / Kota yang memiliki banyak tantangan yang terus meningkat dari tahun-ketahun yang melibatkan masyarakat dan pemerintah Kota Bengkulu. Salah satunya mengenai pengangguran yang disebabkan karena bertambahnya angka kenaikan jumlah penduduk disetiap tahunnya. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penghambatan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Karena itu peran pemerintah Kota Bengkulu sangat penting dan dibutuhkan untuk menanggulangi peningkatan angka pengangguran di Kota Bengkulu.¹⁰ Pemerintah harus mampu membuat kebijakan berkelanjutan yang didasari pada prinsip keadilan sosial dan transparansi untuk menarik partisipasi masyarakat dalam mencari pekerjaan yang tidak hanya berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, tetapi juga dengan upaya peningkatan skill keterampilan masyarakat melalui program pelatihan dan produktivitas kerja yang dibutuhkan¹¹. Penelitian ini bertujuan menganalisis upaya Pemerintah Daerah dalam menangani masalah pengangguran ditinjau dari perspektif *siyasah tanfidziyah*.

Berdasarkan uraian aspek yuridis dan faktual tersebut, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu memiliki landasan hukum yang kuat dan

⁹ Ibn Taimiyah, *As-siyasah Asy-syar'iyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998, h. 13.

¹⁰ Eviyati, dan Titi Darmi. "Analisis Program Kerja Balai Latihan Kerja untuk Penanggulangan Pengangguran di Bengkulu." *PETAHANA: Journal of Social Politics and Public Administration*, Vol. 1, No. 2, h.147

¹¹ Putri Mayyadah, Efa Rodiah Nur, dan Ahmad Sukandi. "Review of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on The Implementation of The Village Government." *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 11, No. 1, h. 225

kewenangan yang jelas dalam mengelola ketenagakerjaan serta menanggulangi pengangguran. Namun, kenyataan dilapangan menunjukkan masih adanya kesenjangan antara hak warga negara atas pekerjaan yang layak dengan kondisi pengangguran dan kemiskinan yang masih belum signifikan. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengangguran Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah tanfidziyah*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam menanggulangi pengangguran di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dalam menanggulangi pengangguran di Kota Bengkulu perspektif *siyasah tanfidziyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan terkait kebijakan dan program pemerintahan kota Bengkulu dalam menanggulangi dan meminimasir angka penganguran di kota Bengkulu
2. Menganalisis / mengamati pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah Bengkulu berdasarkan perspektif *siyasah tanfidziyah*.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan agar memiliki manfaat yang diharapkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat membantu pemahaman tentang tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengurus masalah sosial seperti pengangguran dengan

menggunakan perspektif *siyasah tanfidziyah*. Selain itu, dapat memberitahu bagaimana kinerja Pemerintah Daerah Bengkulu untuk membangun kesejahteraan rakyatnya dalam konsep ketenagakerjaan yang sedang diupayakan guna meminimalisir angka pengangguran yang terus meningkat dari tahun-ketahun. Dari penelitian ini semoga dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya.

2. Secara Praktis

Dengan diadakannya upaya program yang dilakukan oleh pemerintah dapat mendorong semangat masyarakat dalam mencari pekerjaan untuk mengurangi angka pengangguran yang terjadi, dan dapat menyadarkan masyarakat tentang fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah demi kesejahteraan bersama.

Dengan begitu dapat tercipta kerjasama yang baik dalam mengurangi angka pengangguran di kota Bengkulu antara pemerintahan, lembaga, dan sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri dalam penyelenggaraan program pelatihan kerja yang relevan sehingga dapat menciptakan peluang kerja yang lebih luas. Kemudian penelitian ini diharapkan menjadi pengingat bahwa kebijakan Pemerintah naik sekecil apapun itu harus tetap memprioritaskan rakyat dengan nilai-nilai yang ditetapkan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pengangguran. Antara lain :

Tabel.1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama / Judul Penelitian	Isi Penelitian	Perbandingan
1	Ellyza Cindi Mentari, Waizul	Rumusan Masalah pada	Perbedaan : Lokasi yang digunakan

	Qarni / Peran Pemerintah Melalui Program Pelatihan Dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan). (Jurnal 2023)	penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah berperan dalam mengurangi angka pengangguran melalui program pelatihan kerja. Latar belakangnya muncul karena tingginya tingkat pengangguran di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan studi kasus. dipilih agar dapat menggali data secara mendalam dari dinas terkait dan masyarakat penerima program, sehingga memberikan pemahaman nyata tentang efektivitas kebijakan.	dalam penelitian yang telah dilakukan di Medan sedangkan penulis melakukan penelitian di kota Bengkulu, hambatan yang dilakukan dalam penelitian terdahulu yakni tentang pandemi dan keterbatasan peserta. sedangkan hambatan penulis dalam melakukan penelitian terletak pada anggaran, koordinasi, dan minat masyarakat Bengkulu yang rendah. Kemudian perspektif yang digunakan oleh penelitian yang telah dilakukan menggunakan ekonomi Islam , sedangkan penelitian yang terbaru dilakukan dengan perspektif <i>siyash tanfidziyah</i>.¹²
2	Mustika Maghdalena / Tanggung Jawab	Rumusan Masalah Penelitian ini	Perbedaan: Pada skripsi atau penelitian yang telah

¹² Ellyza Cindi Mentari, dan Waizul Qarni. "Peran Pemerintah Melalui Program Pelatihan dalam Mengurangi Jumlah Pengangguran Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan)." Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. 8, No. 1, 2023, h. 518.

	Pemerintah Dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan Dan Hukum Islam (Skripsi)	mengkaji sejauh mana pemerintah daerah berperan dalam menekan angka pengangguran melalui kebijakan dan program ketenagakerjaan. Permasalahan ini muncul karena tingginya angka pengangguran yang menjadi isu sosial penting. Metode dalam penelitian ini Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dipilih karena mampu menggambarkan secara rinci pelaksanaan program pemerintah serta dampaknya bagi masyarakat, sehingga diperoleh pemahaman nyata mengenai efektivitas kebijakan.	dilakukan oleh Mustika Maghdalena ini menggunakan pendekatan hukum Islam secara umum dilakukan pada Tahun 2018 dan objek penelitiannya umum tidak ada spesifik yang berfokuskan Daerah., namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan perspektif <i>siyasahtanfidziyah</i> dilakukan pada tahun 2025 berfokus pada Kota Bengkulu saja. ¹³
3	Rizky Agusta Ednarda AB / Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	Rumusan Masalah Penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan	Perbedaan : Dalam penelitian ini yang menjadi pembeda antara penelitian yang sedang dilakukan peneliti dengan

¹³ Mustika Maghdalena," *Tanggung Jawab Pemerintah dalam Menyediakan Lapangan Pekerjaan Ditinjau Dari Konsep Negara Kesejahteraan dan Hukum Islam*", Skripsi, IAIN Bengkulu, 2018, h. 4.

	dalam menanggulangi Perangguran di Kota Bengkulu (Skripsi 2023)	kebijakan ketenagakerjaan oleh pemerintah Kota Bengkulu dalam upaya mengatasi tingginya angka pengangguran. Permasalahan ini muncul karena meningkatnya jumlah pencari kerja yang memerlukan langkah nyata dari pemerintah. Metode penelitian ini Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan fokus utama menilai sejauh mana efektivitas pelatihan tenaga kerja serta koordinasi antarinstansi terkait.	penelitian yang sudah dilakukan oleh Rizky terletak pada fokus pengimplementasian ketenagakerjaan secara umum dan tidak menggunakan perspektif <i>siyash tanfidziyah</i> dan metode yang digunakan peneliti adalah Kualitatif sedangkan penelitian yang sudah dilakukan menggunakan metode Kuantitatif. ¹⁴
4	Rezky Wulan Ramadhani / Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Rumusan Masalah Penelitian ini mengkaji perkembangan masalah pengangguran di Banda Aceh serta kebijakan pemerintah dalam	Perbedaan Terletak Pada Objek Penelitian Lokasinya Berbeda Diantara Penetian Yang Dilakukan Penulis Dengan Penelitian Yang Telah Dilakukan Oleh Rezky, Kemudian Pendekatan Yang Dilakukan Juga Berbeda. Peneliti

¹⁴ Rizky Agusta Ednarda AB, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu", (Skripsi, Asdaf Kota Bengkulu, 2024), hlm. 2

	(Skripsi 2022)	menanganinya berdasarkan prinsip Ekonomi Islam. Permasalahan muncul karena meskipun program pelatihan kerja sudah sesuai dengan konsep Ekonomi Islam, penerapannya belum sepenuhnya berhasil menekan angka pengangguran secara signifikan. Metode penelitian ini Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data melalui studi lapangan dan analisis dokumen kebijakan pemerintah terkait.	Menggunakan Perspektif <i>Siyasah tanfidziyah</i> Sedangkan Penelitian Rezky Menggunakan Ekonomi Islam, Kemudian Perbedaan Di Fokus Analisis Penelitian Yang Dilakukan Peneliti Ini Menemfokuskan Pada Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Pengangguran Secara Nyata Serta Kendala¹⁵
5	Arum Restu Aji / Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang	Rumusan Masalah Penelitian ini menelaah penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait penyediaan	Perbedaan : Penelitian yang telah dilakukan ini Fokus hanya pada kelompok penyandang disabilitas dalam proses rekrutmen ASN, dengan lingkup terbatas pada implementasi UU No. 8

¹⁵ Rezky Wulan Ramadhani. "Analisis Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Pengangguran di Kota Banda Aceh dalam Perspektif Ekonomi Islam." Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022, h. 48

	Disabilitas di Kota Bengkulu Perspektif <i>Siyasah tanfidziyah</i> 2024 (Skripsi 2024)	lapangan kerja bagi kelompok penyandang disabilitas. Fokus kajiannya adalah sejauh mana kebijakan ini mampu memberikan perlindungan serta peluang kerja yang adil. Metode penelitian ini Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah aturan hukum serta implementasinya di lapangan melalui analisis dokumen dan wawancara pendukung.	Tahun 2016 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis Cakupan lebih luas mencakup seluruh populasi usia kerja, memadukan tinjauan regulasi dengan kondisi faktual di lapangan, serta fokus pada tingkat pengangguran dan kesejahteraan masyarakat. Metode pendekatan yang digunakan peneliti adalah yuridis sosiologis , sedangkan yang dilakukan Arum adalah yuridis Normatif. ¹⁶
--	--	---	---

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian hukum yang tidak hanya berfokus pada peraturan tertulis, tetapi juga mengkaji bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum dipahami sebagai fenomena yang hidup, dinamis, dan berkaitan langsung dengan praktik yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan

¹⁶ Arum Restu Aji. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dalam Proses Penerimaan Pegawai Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*." Repository UIN FAS Bengkulu, 2024. h.8

maupun masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan sosiologis yang dipadukan dengan perspektif siyasah tanfidziyah. Pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan dan peraturan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat, khususnya para pencari kerja di Kota Bengkulu. Pendekatan ini memberikan kerangka nilai-nilai Islam untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga hukum dipahami bukan hanya sebagai landasan hukum formal, tetapi juga sebagai sarana sosial yang berinteraksi dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.¹⁸

Pendekatan ini bertujuan untuk melihat bagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya melalui program dan kebijakan yang dijalankan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bengkulu dalam upaya mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu, pendekatan ini tidak hanya mempelajari norma hukum, tetapi juga meninjau pelaksanaan hukum di lapangan secara faktual.

2. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*, yakni penetapan informan berdasarkan kriteria tertentu karena dianggap memiliki kapasitas pemahaman serta keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹ Informan

¹⁷ Soerjono Soekanto, " *Pengantar Penelitian Hukum* ", (Jakarta: UI Press, 1986), h. 51.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, " *Penelitian Hukum* ", (Jakarta: Kencana, 2016), h. 133.

¹⁹ Sugiyono, " *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif* ", (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85.

dalam penelitian ini terdiri atas Aparatur Pemerintah Daerah khususnya pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Akademisi dari Dosen yang berkompeten dalam bidang hukum positif serta siyash syar'iyah , dan masyarakat pencari kerja atau peserta program pelatihan kerja yang merasakan langsung dampak kebijakan Pemerintah Daerah.

Apabila diperlukan, akan diterapkan pula teknik *Snowball Sampling* untuk memperoleh informan tambahan melalui rekomendasi dari narasumber utama.²⁰ Penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintah Daerah yang terlibat seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bengkulu, Dinas Sosial dan Instansi pendukung lainnya seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai pengalokasian anggaran APBD terkait program ketenagakerjaan dan UPTD Pelatihan Kerja Bengkulu.

3. Sumber Data

a) Data primer

Didapatkan secara langsung melalui wawancara dan dokumentasi di Lapangan melalui wawancara dengan pejabat Kadis dan Kabid Instansi Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bengkulu untuk informasi terkait program penanggulangan pengangguran dan dari data instansi yang terkait untuk mendapat informasi yang dibutuhkan termasuk BPS Bengkulu.

b) Data skunder

Data skunder diperoleh dari dokumen dan sumber tertulis seperti Buku, Jurnal, Dokumentasi kebijakan pelatihan kerja dari Dinas Ketenagakerjaan, laporan APBD,

²⁰ Lexy J. Moleong, “ *Metodologi Penelitian Kualitatif* “, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h.224.

Undang - Undang yang terkait untuk dijadikan data tambahan.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah melalui tiga tahap utama. Pertama, dilakukan reduksi data, yaitu memilih dan menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data, di mana data disusun dalam bentuk uraian atau tabel agar lebih mudah dipahami. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu memberikan interpretasi terhadap data yang ada dan memverifikasinya agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggung jawabkan.²¹

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, sehingga diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

BAB I : Pendahuluan yang berisi mengenai judul, dan latar belakang yang akan menjelaskan mengenai bagaimana masalah ini muncul dan perlu untuk diteliti, kemudian disimpulkan menjadi suatu rumusan masalah, tujuan dan kegiatan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. berikut :

BAB II : Berisi mengenai kerangka teori implementasi peraturan-peraturan mengenai peraturan Undang-Undang dan teori *Siyasah tanfidziyah* sebagai hukum islam.

BAB III : Pada bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian mengenai Pengangguran Di Kota Bengkulu.

²¹ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman, " *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* ", (Jakarta: UI Press, 1992), h. 16.

BAB IV : Pada bab ini merupakan inti dari skripsi karena akan menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana Tanggung Jawab Pemerintahan Daerah Dalam Penanggulangan Pengangguran Di Kota Bengkulu Perspektif *Siyasah tanfidziyah*. Pada bab ini juga berisi hasil penelitian dan jawaban peneliti berisi pertanyaan yang disusun dalam rumusan masalah, kemudian dianalisis sehingga dapat terjawab pokok pertanyaan yang diajukan.

